

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.1 Struktur dan Karakteristik Fisik Dasar

2.2.1 Letak Geografis Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu dari 4 kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 18 kecamatan yaitu ; Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin. Kabupaten Gunungkidul terletak disebelah tenggara kota Yogyakarta (Ibu Kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) yang tepatnya ada di antara $110^{\circ}21-110^{\circ}50$ Bujur Timur dan $7^{\circ}46-8^{\circ}09$ Lintang Selatan, sedangkan tingginya bervariasi antara 0 meter sampai 700 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Gunungkidul beribukota di Wonosari. Jarak kota Wonosari menuju Yogyakarta (Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta) ± 39 km atau sekitar 1jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum, sedangkan secara administratif Kabupaten Gunungkidul berbatasan dengan beberapa kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di Jawa Tengah. Batas-batas wilayah Kabupaten Gunungkidul secara administratif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Batas Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Sebelah/Bagian	Perbatasan
1. Utara	Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo (Propinsi Jawa Tengah).
2. Timur	Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah).
3. Selatan	Samudra Indonesia.
4. Barat	Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman (Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul 2003

2.1.2 Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah 1,485,36 Km², secara administrasi terbagi menjadi 18 Kecamatan, dan 144 Desa/Kelurahan. Kecamatan yang merupakan kecamatan terluas adalah Kecamatan Semanu dengan luas 108,39 Km² yaitu 7,30% dari Wilayah Kabupaten Gunungkidul, sedangkan kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Ngawen dengan luas 46,59 Km² yaitu 3,14% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul. Keseluruhan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kabupaten Gunungkidul
Dirinci Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase Luas
Panggung	99,80	6,72
Purwosari	71,76	4,83
Paliyan	58,07	3,91
Saptosari	87,83	5,91
Tepus	104,91	7,06
Tanjungsari	71,63	4,82
Rongkop	83,46	5,62
Girisubo	94,57	6,37
Semanu	108,39	7,30
Ponjong	104,49	7,03
Karangmojo	80,12	5,39
Wonosari	75,51	5,08
Playen	105,26	7,09
Patuk	72,04	4,85
Gedangsari	68,14	4,59
Nglipar	73,87	4,97
Ngawen	46,59	3,14
Semin	78,92	5,31
Jumlah	1.485,36	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul tahun 2003

2.2 Keadaan Sosial Kependudukan

2.2.1 Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Gunungkidul berdasarkan hasil registrasi pertengahan tahun 2003 berjumlah 753.008 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan

dan 144 desa, dengan jumlah terbanyak yaitu Kecamatan Wonosari dengan 78.464 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul pada akhir tahun 2003 telah mencapai 754.047 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gunungkidul
Tahun 1999-2003

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)
1999	739.259	0,40
2000	743.282	0,54
2001	746.451	0,42
2002	749.875	0,45
2003	753.008	0,42

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul 2003

Dari data pada table 2.3, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gunungkidul yang paling tinggi adalah pada tahun 2000 dengan persentase pertumbuhan 0,54% dan jumlah penduduk keseluruhan pada tahun tersebut sebesar 743.282 jiwa, sedangkan pertumbuhan yang paling kecil adalah pada tahun 1999 dengan persentase 0,40% dan jumlah penduduknya sebesar 739.259 jiwa.

2.2.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk Kabupaten Gunungkidul pada pertengahan tahun 2003 tercatat sebanyak 753.008 jiwa yang terdiri dari 368.760 jiwa penduduk laki-laki dan 384.248 jiwa penduduk perempuan, dengan jumlah keluarga sebesar 155.629 keluarga. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di

Kecamatan Wonosari, yaitu sebanyak 78.464 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang terendah terdapat di Kecamatan Purwosari yakni sebanyak 21.988 jiwa. Rata-rata jumlah penduduk per keluarga di Kabupaten Gunungkidul adalah 4,84 dan ini berarti setiap keluarga di Kabupaten Gunungkidul diasumsikan dihuni oleh hampir 5 jiwa. Kecamatan Gedangsari merupakan kecamatan yang rata-rata penduduk per keluarganya terbesar, yaitu 5,39 sedangkan Kecamatan Karangmojo merupakan kecamatan yang rata-rata jumlah penduduk per keluarganya terendah, yaitu sebesar 4,30.

Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah sebesar 1.485,36 km² pada pertengahan tahun 2003 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 753.008 jiwa yang menyebar di 18 kecamatan. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul pada akhir tahun 2003 sebanyak 507 jiwa per km² dengan daerah terpadat adalah di Kecamatan Wonosari dengan kepadatan 1.039 jiwa per km² sedangkan wilayah kecamatan yang kepadatan penduduknya sedikit adalah Kecamatan Panggang yaitu dengan kepadatan 282 jiwa per km².

Daerah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 144 desa/kelurahan yang tersebar di setiap kecamatan. Kecamatan Wonosari yang merupakan kecamatan terpadat, juga memiliki jumlah desa/ kelurahan paling banyak yaitu sebanyak 14 desa, sedangkan kecamatan yang mempunyai jumlah desa/kelurahan paling sedikit ada 4 kecamatan yaitu antara lain ; Kecamatan Purwosari, Tepus,

Tanjungsari, dan Semanu. Secara lengkap data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Banyaknya Desa/Kelurahan
Per Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Jumlah Desa
Panggang	28.176	282	6
Purwosari	21.988	306	5
Paliyan	31.657	545	6
Saptosari	36.901	420	7
Tepus	38.750	369	5
Tanjungsari	28.235	394	5
Rongkop	32.318	387	8
Girisubo	27.852	295	8
Semanu	58.232	537	5
Ponjong	56.331	539	11
Karangmojo	56.597	706	9
Wonosari	78.464	1.039	14
Playen	59.896	569	13
Patuk	31.569	438	11
Gedangsari	40.221	590	7
Nglipar	35.048	474	7
Ngawen	35.867	770	6
Semin	54.906	696	10
Jumlah	753.008	507	144

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003

2.3 Keadaan Ekonomi

Perekonomian di Kabupaten Gunungkidul terbentuk dari sektor-sektor yang saling mendukung satu sama lain. Indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di dalam suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Dengan indikator itu, mampu memberikan indikasi tentang sejauh mana aktifitas yang terjadi dalam suatu periode tertentu dapat menghasilkan pendapatan tambahan kepada masyarakat suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada periode tertentu lebih besar dari periode sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan perekonomian suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut. PDRB digunakan sebagai indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah penggunaan angka-angka PDRB atas dasar harga konstan yang dimaksudkan agar pengaruh perubahan harga dalam pendapatan atas dasar harga berlaku telah dihilangkan. Selain itu, ada atau tidaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan ditunjukkan dengan angka pertumbuhan pendapatan dengan atas dasar harga konstan.

Kondisi umum perekonomian Kabupaten Gunungkidul dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik

ditandai dengan PDRB yang selalu meningkat tiap tahun. Kegiatan perekonomian Kabupaten Gunungkidul tidak hanya terkonsentrasi pada sektor yang dominan saja. Meski pada kenyataannya sektor pertanian merupakan sektor yang memberi sumbangan terbesar dan dominan dalam PDRB Kabupaten Gunungkidul, namun setiap sektor tetap memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul.

Perkembangan PDRB Kabupaten Gunungkidul tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 dengan atas dasar harga konstan tahun 1993 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Kabupaten Gunungkidul
Tahun 1999-2003 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	1999	2000	2001	2002	2003
Pertanian	339.960	347.344	349.410	349.358	350.452
Pertambangan dan Galian	16.595	16.839	17.470	17.175	17.836
Industri Pengolahan	108.140	111.341	112.178	110.602	121.180
Listrik, Gas& Air Bersih	1.112	2.160	2.253	2.390	2.662
Bangunan	74.584	75.096	75.433	75.824	76.343
Perdagangan,hotel& Restoran	96.627	99.350	102.508	107.824	110.399
Angkutan & Komunikasi	91.997	94.478	94.820	95.678	99.383
Keuangan,Persewaan & jasa Perusahaan	35.331	40.219	41.621	42.620	43.307
Jasa-Jasa	140.276	143.669	155.194	158.897	167.455
Jumlah	905.619	930.496	950.887	968.908	989.017

Sumber :BPS Kabupaten Gunungkidul 2003

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kabupaten Gunungkidul atas dasar harga konstan 1993 pada tahun 2003 sebesar 989.017 juta rupiah atau naik sekitar 20.109 juta rupiah dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2002. Sektor pertanian tetap menjadi sektor yang dominan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 16,9% dari PDRB Kabupaten Gunungkidul. Sektor lain yang cukup besar kontribusinya adalah sektor industri pengolahan mengingat Kabupaten Gunungkidul yang hanya terdapat industri non migas yang dalam pengelolaannya dikelompokkan menjadi industri Besar Sedang, Industri Kecil dan Rumah Tangga. Sedangkan berikutnya sektor-sektor yang mempunyai kontribusi diurutkan sesuai besar kontribusinya adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Angkutan dan Komunikasi, Sektor Bangunan, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Sektor Pertambangan dan Galian dan yang terakhir adalah Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.

2.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam jangka waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun anggaran 1999 sebesar Rp. 86.717.911.346,33 ,tahun anggaran 2000 sebesar Rp. 98.466.865.940,79, tahun anggaran 2001 sebesar Rp. 172.790.002.450,00, pada tahun anggaran 2002 sebesar Rp. 251.665.063.589,41, sedangkan pada tahun 2003 sebesar Rp.

303.666.803.693,00. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul setiap tahunnya mengalami kenaikan pendapatan untuk belanja daerah, sehingga pembangunan ekonomi masyarakat dan prasarana publik lebih meningkat.

2.3.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul

Untuk mengetahui sumber-sumber PAD yang dimiliki daerahnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu mengenal lebih dekat lagi tentang struktur PAD yang dimiliki, sehingga dapat pula mengetahui sumber PAD yang berpotensi dan kurang potensial. Dengan mengetahui sumber-sumber yang potensial maupun tidak potensial, Pemda diharapkan dapat menitikberatkan perhatiannya pada sumber PAD yang potensial dan berupaya menggali agar lebih optimal, sedangkan untuk sumber PAD yang kurang potensial, Pemda perlu melakukan koreksi dan mengkaji lebih dalam tentang sebab dan kendala yang menyebabkan sumber itu kurang potensial. Dengan demikian Pemda bisa mencari pemecahan masalah untuk lebih meningkatkan potensi-potensi daerah.

Penerimaan dari Retribusi Daerah dan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul mendominasi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Selama periode tahun 1994 sampai dengan 2003, PAD cenderung mengalami peningkatan, meskipun dilihat dari pertumbuhannya pada tahun 1998 dan 2000 mengalami penurunan namun di tahun berikutnya menampakkan kenaikannya kembali. Penurunan pertumbuhan penerimaan PAD pada tahun 1998, disebabkan

oleh krisis moneter yang puncaknya terjadi pada tahun tersebut, dan berdampak pada perekonomian daerah Kabupaten Gunungkidul, sedangkan penurunan pertumbuhan PAD yang terjadi pada tahun 2000, seperti daerah-daerah lainnya disebabkan oleh perubahan perhitungan tahun yaitu tahun fiskal menjadi tahun kalender. Akibat dari perubahan tersebut, jumlah perhitungan bulan pada tahun anggaran 2000 adalah sembilan bulan sedangkan tahun anggaran yang lainnya menggunakan perhitungan yang jumlahnya 12 bulan.

Besarnya pertumbuhan penerimaan PAD dari tahun 1994 sampai dengan 2003 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Pertumbuhan PAD Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 1994-2003

Tahun Anggaran	Penerimaan PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)
1994	1.888.178.000,00	-
1995	2.622.789.008,51	38,90
1996	2.956.810.613,55	12,73
1997	3.578.070.997,12	21,01
1998	4.074.414.903,99	13,87
1999	5.409.513.658,49	32,76
2000	5.719.379.104,90	5,72
2001	7.488.588.450,00	30,93
2002	13.486.859.839,85	80,09
2003	14.344.042.219,00	6,35

Sumber : BKD Kabupaten Gunungkidul 2003

2.3.3 Retribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul

Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.7

Pertumbuhan Retribusi Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 1994-2003

Tahun Anggaran	Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
1994	1.471.840.000,00	-
1995	1.721.118.926,00	16,93
1996	1.877.379.550,00	9,07
1997	2.357.402.754,90	25,56
1998	2.828.549.190,00	19,98
1999	3.571.247.169,00	26,25
2000	4.245.123.100,00	18,86
2001	6.375.894.278,50	50,19
2002	9.009.394.578,75	41,30
2003	9.906.187.522,00	9,95

Sumber : BKD Kabupaten Gunungkidul 2003

Fluktuasi yang terjadi dalam pertumbuhan retribusi daerah dilatar belakangi oleh berbagai macam sebab. Penurunan pertumbuhan retribusi daerah pada tahun 1998 tentu saja disebabkan oleh dampak krisis moneter yang melanda Negara ini, sedangkan penurunan yang terjadi pada tahun 2000 dikarenakan perubahan perhitungan fiskal menjadi perhitungan kalender. Penurunan pertumbuhan yang terjadi terus menerus pada 3 tahun terakhir, kurang lebih disebabkan oleh berbagai macam masalah yaitu kemarau dengan pergantian musim yang tidak menentu menyebabkan hasil pertanian menurun sehingga penduduk Kabupaten Gunungkidul yang didominasi oleh petani mengalami penurunan pendapatan dan secara umum mempengaruhi pendapatan perkapita.

2.3.4 Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul

Retribusi Terminal merupakan kegiatan dari Retribusi Daerah yang juga merupakan PAD di Kabupaten Gunungkidul. Panerimaan Retribusi Terminal diperoleh dari pemungutan retribusi angkutan umum yang masuk terminal yaitu, AKAP, AKADP, Angkudes dan Angkot. Selain pungutan yang masuk terminal, penerimaan Retribusi Terminal juga diperoleh dari fasilitas-fasilitas yang disediakan di dalam lingkungan terminal. Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Pertumbuhan Retribusi Terminal
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 1994-2003

Tahun Anggaran	Penerimaan Retribusi Terminal (Rp)	Pertumbuhan (%)
1994	68.081.900	-
1995	47.181.300	-30,69
1996	50.961.600	8,01
1997	54.681.000	7,29
1998	53.891.300	-1,44
1999	55.266.000	2,55
2000	45.091.600	-18,40
2001	66.415.100	47,28
2002	74.626.400	12,36
2003	91.949.500	23,21

Sumber : BKD Kabupaten Gunungkidul 2003

Dari tabel tersebut, dapat dilihat pertumbuhan Retribusi Terminal pada sepuluh tahun terakhir dari tahun anggaran 1994 sampai dengan tahun anggaran 2003, penerimaan Retribusi Terminal cukup mengalami fluktuasi yang berarti seiring dengan pertumbuhannya yang mengalami kenaikan dan penurunan.

Pada tahun anggaran 1995 pertumbuhan Retribusi Terminal mengalami penurunan sebesar 30,69% dan mulai mengalami kenaikan yang cukup berarti pula pada tahun 1996 yaitu sebesar 8,01%, kemudian seiring dengan proses menuju krisis moneter yang melanda Negara Indonesia, tentu saja membawa dampak pada pertumbuhan Retribusi Terminal. Pada tahun 1997 kenaikan hanya 7,29% dan pada tahun 1998 yang merupakan puncak dari krisis moneter, pertumbuhan Retribusi Terminal mengalami penurunan sebesar 1,44%. Pada tahun 1999, pertumbuhan mulai mengalami kenaikan sebesar 2,55%, namun pada tahun 2000 menurun sebesar 18,40% yang disebabkan oleh perubahan perhitungan tahun fiskal menjadi perhitungan tahun kalender. Sedangkan pada tahun 2001, pertumbuhan Retribusi Terminal justru mengalami kenaikan yang berarti yaitu sebesar 47,28%. Pada tahun 2002 kenaikan pertumbuhan Retribusi Terminal sebesar 12,36% dan pada tahun 2003 kenaikan pertumbuhan Retribusi Terminal sebesar 23,21%.

2.4 Badan Keuangan Daerah

Dengan adanya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mengalami transformasi kelembagaan dalam pemerintahannya. Di era Otonomi Daerah ini, Pemerintah daerah mengalami transformasi pada lembaga/ badan penerimaan keuangan daerah, yang sebelumnya penerimaan daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA). Sesuai dengan Keputusan Bupati

Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul, sekarang di Kabupaten Gunungkidul, penerimaan keuangan daerah dikelola oleh Badan Keuangan daerah (BKD).

2.4.1 Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Dalam ketentuan umum Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 03 tahun 2001, telah dijelaskan bahwa dalam Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul,

- Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- Sekretaris adalah Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi.
- Kas daerah adalah Aparat/Lembaga Keuangan Daerah yang melaksanakan pekerjaan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan Daerah.

Tugas Badan Keuangan Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan, dan Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Fungsi Badan Keuangan Daerah menurut Keputusan Kepala Daerah Nomor 03 tahun 2003, antara lain :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan
- c. Penyiapan bahan perencanaan umum di bidang keuangan
- d. Penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan teknis di bidang keuangan
- e. Pengelolaan dan pemungutan pendapatan Daerah
- f. Penyiapan bahan penerimaan dana perimbangan
- g. Penyelenggaraan verifikasi keuangan
- h. Penyelenggaraan perbendaharaan pendapatan dan belanja
- i. Penyiapan bahan koordinasi penepatan target pendapatan
- j. Pelaksanaan pembinaan teknis pendapatan Daerah
- k. Penyiapan bahan pengembangan pendapatan Daerah
- l. Pengelolaan ketatausahaan Badan

Dalam pelaksanaan kegiatannya, organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Bagian
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian-

sub bagian

- c. Unsur Pelaksana : Bidang-bidang yang terdiri dari Sub Bidang-sub bidang
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan dan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang disebut Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Sekretariat terdiri dari tiga sub bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Badan, pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b. Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, pengelolaan tata usaha kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- c. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, mengelola surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan perjalanan dinas serta melaksanakan tugas yang lain diberikan oleh Sekretaris.

Dalam organisasi, Badan Keuangan Daerah terdiri dari beberapa bidang yaitu antara lain :

- Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengembangan Pendapatan, yang terdiri dari Sub Bidang Pendataan, Sub Bidang Penetapan dan Sub Bidang Pengembangan.
- Bidang Penerimaan, yang terdiri dari Sub Bidang Pajak, Sub Bidang Retribusi dan Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.
- Bidang Verifikasi, yang terdiri dari Sub Bidang Verifikasi Pendapatan, Sub Verifikasi Belanja.
- Bidang Perbendaharaan, yang terdiri dari Sub Bidang Belanja Pegawai, Sub Bidang Belanja Non Pegawai dan Sub Bidang perbendaharaan Pendapatan.

Sub Bidang Retribusi merupakan sub bidang dari Bidang Penerimaan dalam Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Menurut Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 03 tahun 2001, Sub Bidang Retribusi mempunyai beberapa tugas yaitu :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan menyiapkan bahan pengelolaan pungutan retribusi.
- b. Mencatat dan mendistribusikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan dokumen lainnya kepada Wajib Retribusi.
- c. Melakukan pungutan retribusi kepada Wajib Retribusi yang tidak menyetorkan sendiri atau secara teknis tidak dimungkinkan menyetorkan sendiri kewajiban retribusinya ke tempat pembayaran.
- d. Mengadministrasikan dan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).
- e. Melakukan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi yang telah melewati jatuh tempo pembayarannya sesuai prosedur yang ditentukan.
- f. Mengadministrasikan dan menyetorkan hasil penagihan Retribusi ke Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).
- g. Melaksanakan tugas pembantuan di bidang retribusi.
- h. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Wajib Pungut.
- i. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penerimaan.

2.4.2 Kewenangan Pengurusan Pendapatan daerah

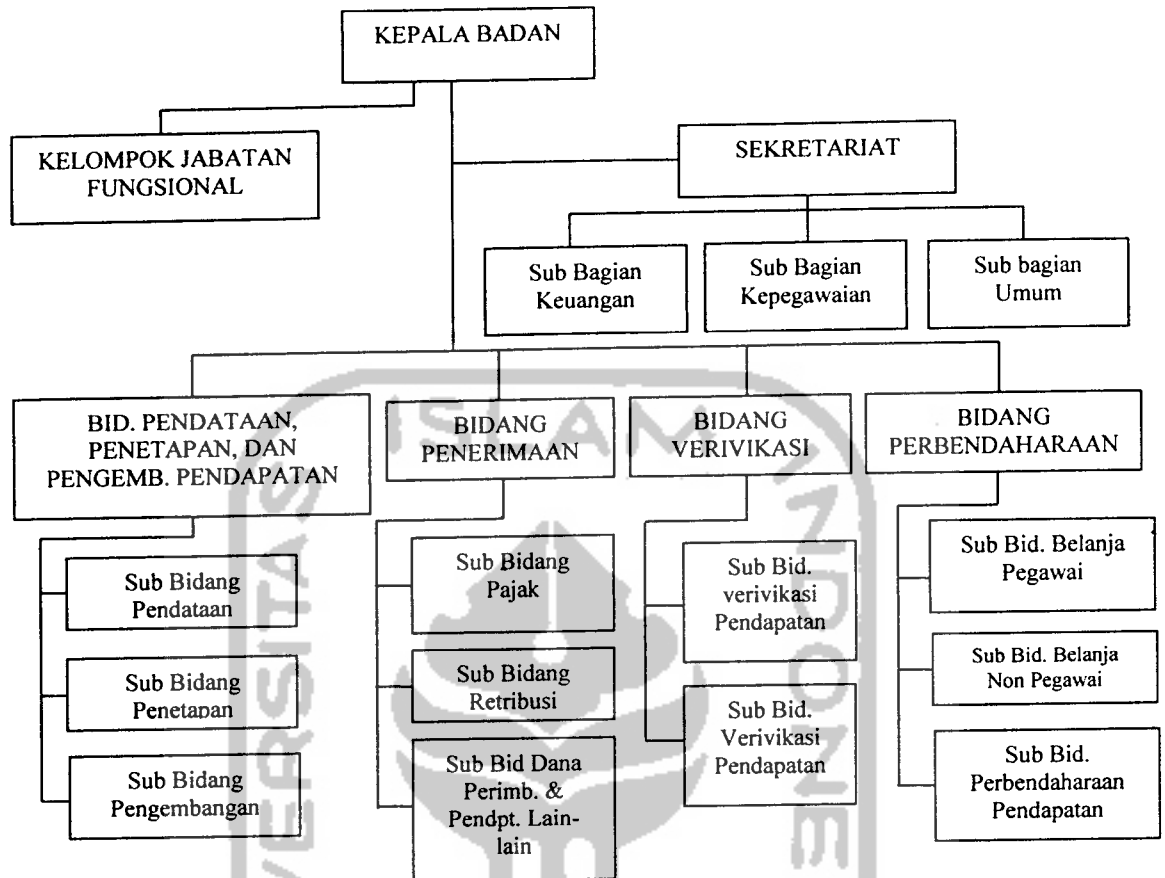
Sebagaimana diatur di dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyelenggarakan pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala Daerah menjaga agar segala peraturan dan lain-lain serta segala piutang daerah ditagih dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.

Kewenangan otorisator di bidang pendapatan daerah pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi kewenangan otorisator berupa penetapan/peninjauan, perubahan peraturan daerah, termasuk perubahan tarif yang menimbulkan hak tagihan pada Pemerintah Daerah.

Kewenangan otorisator ini adalah melakukan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan RAPEDA, baik baru, perubahan atau pencabutan peraturan daerah.
2. Penetapan PERDA di bidang Pendapatan Daerah.
3. Penetapan keputusan pelaksanaan PERDA oleh Kepala Daerah.

Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

**Bagan Struktur Organisasi
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul**

2.5 Sistem Jaringan Jalan dan Jasa Transportasi

2.5.1 Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan di Kabupaten Gunungkidul, menyesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan jaringan trayek yang tersebar di seluruh Kabupaten Gunungkidul. Sumbu utama yang mendominasi jaringan jalan adalah jalur Wonosari-Yogyakarta. Sejak dioperasikan jalan lingkar (*Ringroad*), transportasi di Kabupaten Gunungkidul khususnya di Kota Wonosari terkesan menjadi teratur. Tata keruangan kota yang memberlakukan peraturan jalur baru di Kota Wonosari, menjadikan keteraturan pengguna jalan di dalam kota. Rute untuk mencapai Terminal Wonosari dari seluruh kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, memfungsikan adanya jalur lingkar (*Ringroad*) sebagai jalur trayek menuju terminal.

Perkembangan wilayah Kabupaten Gunungkidul dalam mobilitasnya didukung pula dengan adanya jaringan jalan Kabupaten Gunungkidul yang berhubungan dengan kabupaten lain yaitu, Wonogiri, Klaten dan Bantul.

Tingkat pertumbuhan panjang jalan di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 1999 panjang jalan Kabupaten Gunungkidul adalah sepanjang 1.171,36 Km, tahun 2000 sepanjang 1.191,03 Km, tahun 2001 sepanjang 841,46 Km, tahun 2002 sepanjang 840,66 Km dan pada tahun 2003 tetap sama yaitu sepanjang 840,66 Km.

Panjang jalan Kabupaten Gunungkidul menurut permukaan dan kondisinya tahun 2003 adalah sepanjang 840,66 Km. panjang jalan menurut jenis permukaan bisa di klasifikasikan yaitu, jalan beraspal sepanjang 467,43 Km, yang berkerikil MDK sepanjang 359,43 Km, berupa tanah sepanjang 13,80 Km atau dalam persentase, beraspal sebesar 55,6%, kerikil MDK 42,72% dan yang berupa tanah sebesar 1,64%. Bila dilihat dari kondisi jalan, jalan di Kabupaten Gunungkidul yang dalam keadaan baik sepanjang 503,29 Km atau sebesar 59,86%, dalam keadaan sedang sepanjang 133,74 Km atau sebesar 15,90%, keadaan rusak sepanjang 185,93 Km atau 22,11% sedangkan yang dalam keadaan rusak berat sepanjang 17,70 Km atau sekitar 2,10%.

Panjang jalan menurut statusnya, di Kabupaten Gunungkidul tahun 2003 dapat dirinci sebagai berikut :

- Jalan Negara : 54,88 Km
- Jalan Propinsi : 251,10 Km
- Jalan Kabupaten : 840,66 Km
- Jalan Desa : -

Dari data tersebut, dapat mempengaruhi panjang jalan sesuai kondisi dan jenis permukaan. Semakin banyak jalan yang statusnya lebih tinggi, maka kualitas kondisi dan jenis permukaannya lebih baik. Dengan semakin baiknya kondisi jalan tersebut, maka memacu pertumbuhan kendaraan bermotor di Kabupaten

Gunungkidul yang terbukti dengan banyaknya permintaan konsumen terhadap kendaraan bermotor.

2.5.2 Jasa Transportasi

Untuk mencapai Kota Wonosari, terdapat jalur-jalur yang merupakan jalur menuju Terminal Wonosari dari seluruh kecamatan yang tersebar di Kabupaten Gunungkidul. Mengingat dan menurut undang-undang yang menetapkan adanya sub terminal belum ada, di Kabupaten Gunungkidul hanya terdapat beberapa pelataran parkir yang bisa ditemui diantaranya adalah di Kecamatan Semin, Baran, Semanu, dan Kecamatan Panggang.

Dalam aktivitas mobilitas Kabupaten Gunungkidul dilayani oleh angkutan-angkutan yaitu :

- Bus AKAP (Angkutan Kota Antar Propinsi)
- Bus AKDP (Angkutan Kota Dalam Propinsi)
- Angkudes (Angkutan Pedesaan)
- Angkot (Angkutan kota)

Selain angkutan-angkutan tersebut, terdapat angkutan yang lain yaitu becak yang khususnya di Kota Wonosari dan ojek. Angkutan Bus AKAP melayani jalur antar propinsi seperti Wonosari-Yogyakarta-Wonosari. Angkutan Pedesaan melayani jalur dari seluruh kecamatan menuju Terminal Wonosari dan angkot melayani jalur dalam Kota Wonosari.

Dalam pelayanan Angkudes, di Kabupaten Gunungkidul mengusahakan pelayanan yang optimal yaitu jalur dari kecamatan menuju ibukota Kabupaten Gunungkidul yaitu Wonosari. Jaringan transportasi di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Data Transportasi
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003

Rute	Jarak (Km)	Waktu (menit)
I. Angkutan Luar Kabupaten		
Jogja-Wonosari	40	55
II. Angkutan Dalam Kabupaten		
1. Wonosari-Panggang	38	50
2. Wonosari-Paliyan	15	25
3. Wonosari-Saptosari	19	30
4. Wonosari-Tepus	17	30
5. Wonosari-Rongkop	26	30
6. Wonosari-Semanu	7	10
7. Wonosari-Ponjong	15	20
8. Wonosari-Karangmojo	9	10
9. Wonosari-Playen	7	10
10. Wonosari-Patuk	21	20
11. Wonosari-Gedangsari	23	45
12. Wonosari-Nglipar	11	15
13. Wonosari-Ngawen	30	30
14. Wonosari-Semin	23	25
15. Wonosari-Girisubo	40	55
16. Wonosari-Tanjungsari	14	20
17. Wonosari-Purwosari	45	60

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003

2.6 Dinas Perhubungan

Sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Dinas-dinas Daerah, disebutkan bahwa Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan pelaksana tugas-tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas perhubungan memiliki tugas, fungsi dan organisasi yaitu sebagai berikut :

A. Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul

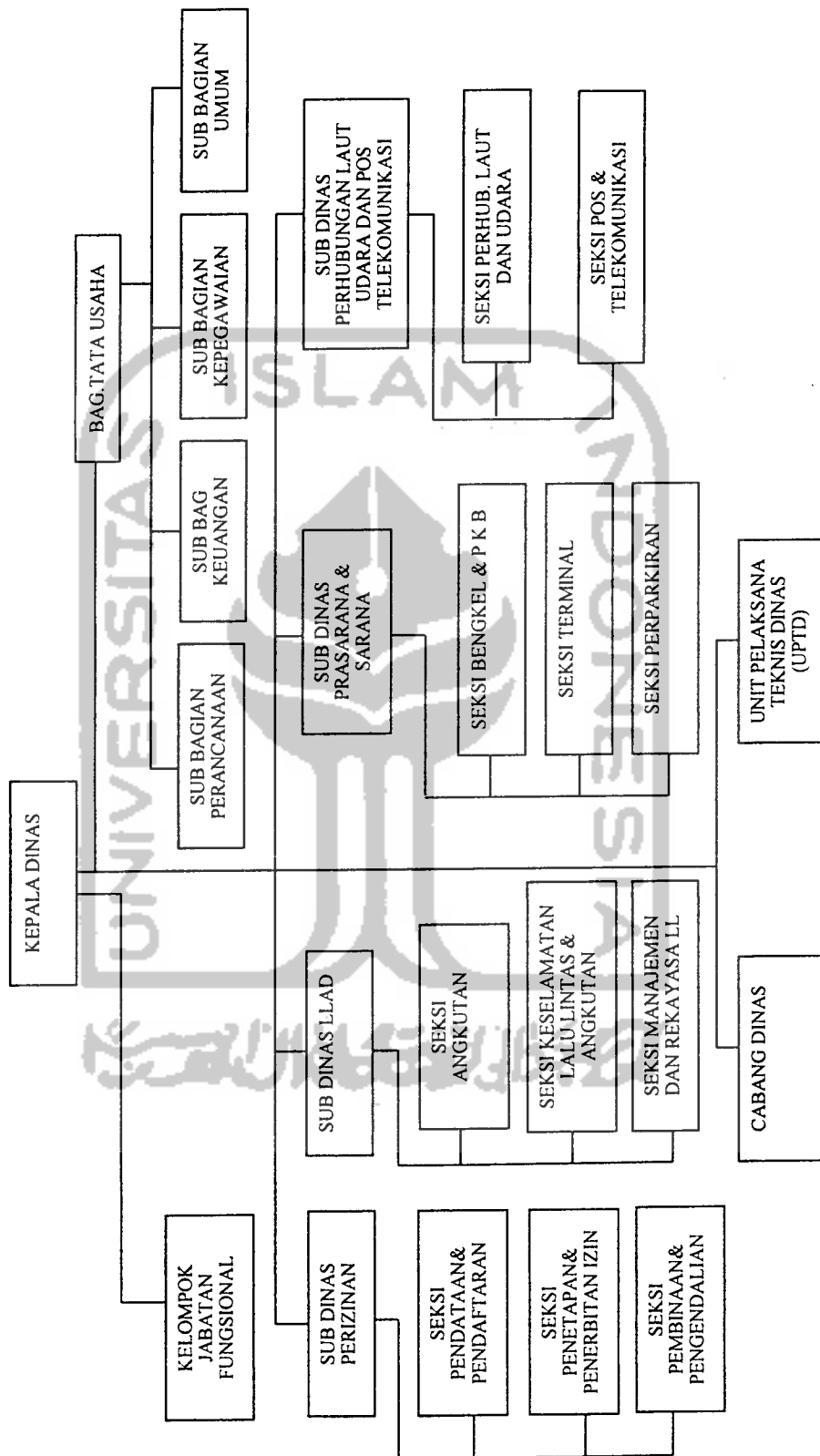
Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 15 tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah di bidang perhubungan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

B. Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perhubungan
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
3. Penyiapan bahan perencanaan umum di bidang perhubungan

4. Penyiapan bahan perencanaan umum kebijakan teknis di bidang perhubungan
 5. Pelaksanaan bimbingan di bidang perhubungan
 6. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program di bidang pertumbuhan darat, laut, udara dan pos telekomunikasi.
 7. Pelayanan perizinan di bidang perhubungan
 8. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat, laut, udara dan pos telekomunikasi
 9. Pengelolaan prasarana dan sarana perhubungan
 10. Pengelolaan ketatausahaan dinas
- C. Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, dapat dirinci sebagai berikut :
1. Unsur Pimpinan : Kepala dinas
 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha terdiri dari sub bagian-sub bagian
 3. Unsur Pelaksana : Sub Dinas-Sub dinas terdiri dari seksi-seksi
 4. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan uraian tugas, fungsi dan organisasi, maka dapat digambarkan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :



Gambar 2.2
 Bagan Struktur Organisasi
 Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul